

KPK Periksa Nurhadi untuk Ketiga kalinya

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi untuk ketiga kali dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali di PN Jakarta Pusat.

"Penyidik menduga pemberian uang yang berkaitan dengan urusan perkara yang dilakukan DAS (Doddy Aryanto Supeno) tidak hanya sekali dan tidak hanya kepada satu orang, itu salah satu yang ingin dikonfirmasi kepada yang bersangkutan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (3/6).

Saat ini Nurhadi sedang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ia sudah diperiksa pada 24 dan 30 Mei 2016.

Selain soal pemberian uang, KPK juga mengonfirmasi sejumlah uang dan dokumen yang ditemukan KPK pada penggeledahan 21 April 2016 di rumah Nurhadi.

KPK juga sudah memeriksa istri Nurhadi yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA Tin Zuraida dan dua pegawai rumah Nurhadi yaitu Kasirun alias jengot dan Sairi alias Zahir.

KPK sudah mencegah Nurhadi untuk bergajian keluar negeri dan menggeledah rumahnya di Jalan Hang Lekir pada 21 April 2016 dan menemukan uang total Rp1,7 miliar yang terdiri dari sejumlah pecahan mata uang asing yang diduga terkait dengan pengurusan sejumlah kasus.

Saat ini penyidik KPK juga masih mencari mantan sopir Nurhadi bernama Royani yang sudah dua kali dipanggil KPK tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga Royani diduga disembunyikan.

KPK menduga Royani adalah orang yang menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang punya kasus di MA. Royani sudah diberhentikan oleh MA sejak 27 Mei 2016 karena tidak masuk kantor selama 46 hari.

Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan dua tersangka yaitu panitera/sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap keduanya pada 20 April 2016.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, KPK pasti akan menetapkan tersangka baru dalam kasus ini.

"(Tersangka baru) itu pasti dong, kalau dari pihak mana, bisa dari beberapa pihak kan? Bisa dari Lipponya, bisa dari teman-teman yang ada di MA (Mahkamah Agung), bisa saja itu terjadi," kata Agus pada Kamis (26/5). ■ **mei**

Politisi Senior PDIP Mangara Siahaan Tutup Usia

JAKARTA (IM)- Kabar duka kembali menyelimuti dunia perpolitikan Indonesia. Mantan Anggota DPR RI dan Wakilsekjen PDIP, Mangara M Siahaan tutup usia. Dia meninggal di RS Siloam TB Simatupang, Jumat (3/6), setelah sempat dirawat di ruang ICU beberapa hari.

Mangara meninggal di umur 69 tahun karena mengidap anemia. Ia lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 19 April 1947. Ia adalah Anggota DPR-RI periode 2009-2014 anggota fraksi PDI-P, asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah V.

Mangara Siahaan sebelum terjun ke dunia politik merupakan seorang aktor dan wartawan.

"Iya betul, bapak sakit. Ada kelainan darah, anemia gitu," kata Anak Mangara, Carter Siahaan saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (3/6).

Carter mengaku, ayahnya sudah mengidap penyakit tersebut sejak bulan Januari lalu. Bahkan, ia sudah sering keluar masuk rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. "Kalau skait sejak Januari tahun ini. Sudah keluar masuk (rumah sakit). Tadi (Jumat) kurang lebih jam 4 pagi menghembuskan nafas terakhirnya," tukasnya.

DPP PDI Perjuangan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya politisi senior partai tersebut. Mangara dikenal sebagai pejuang partai yang sangat setia mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam masa-masa yang sangat sulit.

"Kesetiaan tiada akhir baik kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, maupun kepada PDI Perjuangan, menjadikan Pak Mangara sebagai sosok dengan pemahaman lengkap terhadap perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (3/6).

"Pak Mangara menjadi saksi pertemuan-pertemuan penting serta menjadi teman seperjuangan Ketua Umum ketika berkeliling Indonesia, melantik koordinator kecamatan," ujar Hasto.

Menurut Hasto, Mangara Siahaan dikenal sebagai pejuang yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Badannya yang tegap menjadi benteng terbaik Megawati Soekarnoputri menghadapi berbagai bentuk tekanan yang dilancarkan Orde Baru.

"Ibu Megawati Soekarnoputri sungguh merasa kehilangan teman pejuang terbaik dan seluruh jajaran partai diinstruksikan untuk menghormati Pak Mangara sebagai pejuang partai. Kami akan memberikan penghormatan terbaik sebagai pejuang partai," ujar Hasto menyampaikan pesan Megawati.

"Mangara adalah contoh pejuang politik yang konsisten dan tak larut dalam arus kepentingan. Semoga beliau tenang dan meninggalkan idealisme berpartai sebagai cermin generasi," tuturnya.

Hasto menambahkan atas arahan Megawati, keseluruhan rekam jejak perjuangan Mangara Siahaan telah dituliskan dalam memoar perjuangan oleh para wartawan senior beberapa waktu yang dalam buku Megawati Dalam Catatan Wartawan: Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat.

Jenazah politikus senior Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDIP), Mangara Monang Siahaan, disemayamkan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung Raya Nomor 99, Jakarta Selatan, sekira pukul 12.50 WIB.

Dari pantauan di lapangan, pihak keluarga sedang melakukan persiapan untuk berlangsungnya pengkhormatan terakhir dengan adat Batak, Sumatera Utara. Pihak keluarga dan kerabat juga terlihat sudah mengunjungi kantor DPP PDIP. ■ **han**

BG dan Buwas Santer Disebut Masuk Bursa Calon Kapolri

Kompolnas masih 'menggodok' sejumlah nama calon Kapolri untuk direkomendasikan kepada Presiden Jokowi. Luhut Panjaitan selaku Ketua Kompolnas, pihaknya masih memiliki waktu hingga dua pekan sebelum melaporkan kepada presiden.

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan habis dari masa tugasnya pada Juli 2016 mendatang. Sejurus dengan itu, belakangan muncul spekulasi sejumlah nama calon penggantinya sudah dipersiapkan pemerintah. Kabar paling santer Wakil Kepala Polri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) disebut-sebut calon paling kuat untuk menggantikan Badrodin Haiti.

Namun nama Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Budi Waseso atau Buwas, juga masuk radar pembicaraan serius pemerintah untuk mengisi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Terkait hal tersebut, pihak

istana mengatakan, calon Kapolri sepenuhnya kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan siapa yang dianggap paling cocok. "Memang saat ini adalah dalam periode waktu yang diharapkan Presiden segera memutuskan. Saya sendiri jujur sampai hari ini belum tahu," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/6).

Maka itu, terkait beredarnya nama-nama calon Kapolri, termasuk nama Badrodin dan Buwas, publik diminta menunggu keputusan dari Presiden. "Tunggu sampai dengan Presiden mengumumkan," tandasnya.

Seperti diketahui, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tengah 'menggodok' sejumlah nama calon Kapolri untuk direkomendasikan kepada Presiden.

Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Kompolnas menyatakan pihaknya masih memiliki waktu hingga dua pekan ke depan untuk melaporkan kepada presiden.

Sementara itu, politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya mengikuti Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengganti Kapolri. Meski demikian, ia menilai Komjen Pol Budi Gunawan dan Komjen Pol Budi Waseso sama-sama layak untuk menggantikan Badrodin yang akan pensiun pada Juli nanti.

"Tergantung Presiden saja. Semuanya layak, tinggal Presiden saja," ujar Masinton saat dikonfirmasi awak media, Jumat (3/6).

Masinton juga memastikan tidak akan ada keagaduhan lagi, jika Budi Gunawan dipilih Presiden Joko Widodo. Apalagi, kata Masinton, kasus hukum yang sempat menjerat Wakapolri itu

sudah selesai. "Tidak ada masalah lah. Sudah clear kan itu. Itu urusan praperadilan Jakarta Selatan, sudah menyatakan tidak sah, status tersangka yang tidak sah," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, PDIP akan mendukung siapapun yang dijagokan oleh Jokowi. "Jadi Presiden mendukung siapa, PDIP pasti dukung. DPR memberikan persetujuan usulan pemerintah," tandasnya.

Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan menjadi salah satu calon kuat pengganti Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri, dengan alasan kemampuan dan pengalamannya di Korps Bhayangkara.

"Saya rasa itu BG (Budi Gunawan) merupakan profil yang cocok untuk jadi Kapolri," kata anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi dalam keterangan tertulis, Kamis (2/5).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Budi Gunawan memiliki pengalaman yang tak perlu diragukan lagi. Misalnya, ia pernah ditugaskan di Polda Jambi dan Bali,

serta pernah menduduki posisi Kalemdiklat Polri.

"Pernah pula menjabat pada unsur pembantu pimpinan sebagai Kadiv Binkum, pada unsur pengawasan pernah menjabat sebagai Kadiv Propam. Dan juga pada unsur pimpinan sudah berpengalaman menjabat sebagai Wakapolri," ujarnya.

Selain itu, Budi Gunawan memiliki kualitas intelektual yang baik serta memiliki banyak ide untuk mengembangkan Polri. "Hal ini terlihat dari beberapa kali saya mengikuti fit and proper test untuk Kapolri, pada kesempatan tersebut BG adalah orang di balik layar yang menyiapkan banyak hal untuk kegiatan tersebut," ujarnya.

Dengan berbagai pengalaman dan rekam jejaknya, ujar Aboe, Budi Gunawan layak untuk menjadi Kapolri. Apalagi dari internal maupun eksternal turut memberikan dukungan terhadap Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. "Hal ini tentunya menjadi modal utama dalam memimpin institusi Polri," tandasnya. ■ **lus**



PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise (kiri) bersama Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Andi Tenri Palallo mengunjungi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T2A) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (3/6). Kunjungan tersebut untuk memantau penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KPK Periksa Anak Buah Surya Paloh Terkait Suap di Kementerian PURR

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Syarif Alkadri. Ia diminta keterangan terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan

padam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku.

Menurut Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, anak buah Surya Paloh tersebut diperiksa sebagai saksi tersangka Amran Hi Mustary untuk melengkapi berkasnya dalam kasus dugaan suap proyek jalan Kamen PUPR.

"Iya dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM (Amran Hi Mustary)," ujar Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (3/6).

Nantinya, politisi Partai Nasdem tersebut akan diperiksa oleh penyidik KPK seputar pertemuan-pertemuan tersangka Amran yang berkaitan dengan adanya dugaan praktik suap proyek jalan Kamen PUPR.

"Penyidik ingin mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan seputar pertemuan

dan kejadian yang berkaitan dengan proyek jalan yang berasal dari dana aspirasi, yang diduga terdapat praktik suap di dalamnya," jelas Priharsa.

Sebelumnya, KPK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohamad Said terkait kasus serupa pada Kamis, 2 Mei 2016.

Perlu diketahui, Komisi V DPR sendiri tersangkut masalah program aspirasi yang meliputi proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Usulan tersebut muncul setelah sejumlah anggota Komisi V DPR melakukan kunjungan kerja ke Maluku pada Agustus 2015.

Para anggota Komisi V DPR mengusulkan proyek yang akan dikerjakan dengan dana aspirasi yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Namun, usulan proyek tersebut kini terhenti, lantaran sejumlah anggota Komisi V diduga menerima suap dari para pengusaha yang berharap bisa mengerjakan proyek tersebut.

Mereka yakni Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN. Ketiganya diduga menerima fee hingga miliaran rupiah dari Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Sementara tersangka lainnya yakni, Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustari, Abdul Khoir serta dua rekan Damayanti, Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini.

Baru Abdul Khoir yang telah disidangkan. Dia didakwa bersama-sama memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V. Sementara Damayanti, Dessy dan Julia baru akan disidangkan setelah berkas lengkap.

Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp21,38 miliar, SGD1,67 juta, dan USD72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasia So Kok Seng alias Aseng dan Direktur PT Shareen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred. ■ **han**

Indonesia Darurat Cyber, Perluak Dibentuk BCN?

JAKARTA (IM) - Serangan cyber terhadap sistem Teknologi Informasi (TI) meningkat pesat dalam beberapa waktu terakhir ke Indonesia menyebabkan Indonesia masuk dalam daftar negara dalam kondisi darurat cyber.

"Setiap hari Indonesia mengalami banyak serangan cyber dan kita tidak memiliki pertahanan cyber yang terkoordinasi untuk itu," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) Luhut Panjaitan di Jakarta, Jumat (3/6).

Pihaknya mencatat serangan terhadap sistem TI yang menyebabkan sistem berhenti bekerja, pada 2015 meningkat sebesar 33 persen dibandingkan 2014. Dari angka itu sebanyak 54,5 persen berupa serangan yang terjadi pada situs terkait sektor bisnis e-commerce.

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sebuah badan yang menangani persoalan cyber yakni Badan Cyber Nasional (BCN) sebagai bagian dari kebijakan nasional bidang ketahanan informasi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Desk Cyberspace Nasional Kemenkopolkum Agus Barnas mengatakan meski pembahasan BCN telah dilakukan pada 6 Januari 2015 di Istana Kepresidenan antara Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Kabinet, Menkopolkum Tedjo Edhy Purdijatno (ketika itu masih menjabat), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, tetapi hingga saat ini belum terlihat titik terang mengenai pembentukan badan tersebut.

"Berbagai polemik muncul terkait butuh atau tidaknya badan baru tersebut," katanya. Padahal, pihaknya mencatat Indonesia saat ini menempati peringkat ke-2 sebagai sumber serangan cyber dunia dan peringkat ke-1 sebagai negara dengan risiko keamanan akibat serangan cyber yang terbesar.

"Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada 2015 terjadi peningkatan kejahatan cyber hampir empat kali lipat dibanding 2014. Dan semua itu bukan berasal dari luar negeri, tetapi kejahatan cyber yang dilakukan dari dalam negeri dengan target dalam negeri pula," ujar Agus.

Bank Indonesia bahkan memantau terindikasinya peningkatan aktivitas kejahatan berupa penyalahgunaan jaringan sebesar 66,7 persen pada 2015 dibandingkan 2014.

Agus menjelaskan, penyalahgunaan jaringan untuk kejahatan pada transaksi keuangan sebagian besar berupa pencurian data keuangan dan data "login password".

"Terdapat pula kasus berupa manipulasi data keuangan terutama yang terkait dengan transaksi elektronik dan penggunaan uang elektronik," katanya.

Desk Cyberspace Nasional (DCN) Kemenkopolkum telah melakukan kajian mendalam selama tiga tahun sejak 2013 dari sisi teknis, hukum, dan kelembagaan masing-masing institusi yang mungkin berwenang di wilayah cyber tersebut.

Bahkan DCN sudah melakukan studi banding bidang siber di 19 negara dan turut serta dalam 22 even internasional terkait keamanan siber.

Pihaknya telah memetakan berdasarkan nomenklatur kewenangan masing-masing institusi yang berperan di wilayah cyber, ke dalam enam wilayah keamanan cyber yakni Cyber Defense, Cyber Crime, Cyber Intelligence, Cyber Security, Cyber Resilience, dan Cyber Diplomacy. ■ **mei**

KPU Siapkan Aturan untuk Perjelas Kategori Politik Uang

JAKARTA (IM) - Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati, menuturkan ada norma dalam hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang perlu didefinisikan lebih lanjut dalam pedoman teknis terkait politik uang.

"Yang membuat pedoman teknis adalah lembaga yang diberikan otoritas untuk melakukan penegakkan hukum atas pelanggaran itu," kata Ida saat ditemui di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Thamrin, Jakarta, Jumat (3/6).

Salah satunya adalah pasal yang menyatakan tentang kategorisasi politik uang. Dalam Pasal 73 Bab Penjelasan disebutkan bahwa yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transportasi kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan



PEMERIKSAAN HERRY SETIADJI
Tersangka kasus pemerasan terhadap perusahaan wajib pajak Herry Setiadji usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6). Herry diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap perusahaan wajib pajak PT EDM Indonesia.

ARGO PANTES
INTEGRATED TEXTILE INDUSTRY

RALAT PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ARGO PANTES Tbk ("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan ralat pengumuman kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, maka pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta situs web Perseroan (www.argoportes.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2016.

Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 6 Juni 2016.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan harap disampaikan kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 31 Mei 2016.

Jakarta, 4 Juni 2016
PT ARGO PANTES Tbk
Direksi